

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Gubernur, "Pemprov Jawa Barat Incar WTP Ke-7"

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Galamedia/Hal.2

Edisi : Sabtu, 7 April 2018

Kepemimpinan Emil-Oded Bidik Penghargaan BPK

Gubernur, "Pemprov Jawa Barat Incar WTP Ke-7"

OTISTA, (GM).-

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan optimistis Pemprov Jabar kembali menyandang opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, Pemprov Jabar dapat kembali masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik.

Apabila opini WTP tercapai, maka akan menjadi yang Ke-7 bagi Pemprov Jawa Barat, yang secara berturut-turut telah mendapatkan WTP sejak tahun 2011. Pun Jabar akan menjadi provinsi pertama dalam mencapai raihan ini.

"Alhamdulillah, selama ini Jawa Barat sudah enam kali WTP, mudah-mudahan tahun ini kali ketujuhnya, hadiah untuk masa terakhir jabatan saya," kata Aher—sapaan Ahmad Heryawan—usai *entry meeting* bersama BPK Kanwil Jabar, di Gedung Negara Pakuan, Jln. Otto Iskandard di Nata Bandung, Jumat (6/4).

Aher menyatakan, pihaknya telah menyetorkan laporan keuan-

gan ke pihak BPK. Selanjutnya BPK akan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk diperiksa.

"Artinya, kita siap untuk diperiksa oleh BPK. Kita sudah meminta kepada segenap aparat Pemprov Jabar, khususnya para kepala OPD, kepala biro, dikomandani oleh kepala inspektorat

dalam menyiapkan pemeriksaan dari BPK ini," katanya.

Aher menyatakan, tidak terdapat permasalahan yang berarti terkait pengelolaan keuangan. Malahan ia merasa pengelolaan aset di Jawa Barat semakin bagus, keuangan bagus, sistem pengendalian pemerintahan pun semakin bagus."

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa menyebut kegiatan *entry meeting* yang digelarnya bersama gubernur, merupakan suatu pertemuan untuk memulai pemeriksaan.

"Dalam hal ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017 dan akan berlangsung selama dua bulan sampai akhir Mei," katanya.

Arman menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang sudah pihaknya terima dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Adapun yang akan menjadi sasaran penilaian, yakni kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan.

Kejar target

Pemkot Bandung bidik opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun terakhir kepemimpinan Ridwan Kamil-Oded M. Danial. Saat ini, tengah dilakukan penertiban pendataan dan penataan aset agar target tersebut terpenuhi.

Demikian diungkapkan

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Budhi Rukmana, pada program Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukencana, Kamis (5/4).

Menurutnya, Kota Bandung tahun ini tengah berupaya mengejar WTP. Hal ini sesuai target yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 pun sudah diserahkan pada 29 Maret 2018 dan mulai 2 April BPK mulai melakukan audit.

"WTP bukan hanya tanggungjawab BPKA, tapi semua perangkat. Kami optimis target bisa terpenuhi dan sekarang kita tunggu audit BPK," ungkap Budhi.

Ditambahkan Kepala Bidang Aset BPKA Kota Bandung, Siena Halim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama dan diperbaiki agar bisa memenuhi WTP, yakni piutang pajak, persediaan, aset, dan utang jangka pendek. Seperti untuk aset, Pemkot Bandung kesulitan untuk mencari dokumen lama.

(tik/B.95)**